

Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik: Pilar Utama dalam Good Governance

Nazwa Kaila Utomo¹⁾, Ajeng Tita Nawangsari²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Nazwakaila1404@gmail.com¹, ajeng.tita@uinsa.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of transparency and accountability as key pillars in realizing good governance in the public sector. This study uses a qualitative descriptive approach with a Systematic Literature Review (SLR) method that examines various sources such as books, journals, and scientific articles from 2016 to 2024. Data was obtained through Google Scholar and SINTA using the keywords "Transparency," "Accountability," and "Good Governance." The results show that transparency provides open access to information for the public, while accountability ensures that the government is responsible for its policies and budget use. These two aspects play an important role in improving the quality of governance, strengthening public trust, and encouraging public participation in policy oversight. This study is expected to provide input for policymakers to strengthen the implementation of the principles of transparency and accountability in order to create a more effective, open, and trustworthy government.

Keywords: transparency, accountability, good governance, public participation, public sector

1. PENDAHULUAN

Governance atau tata kelola pemerintahan modern tidak lagi hanya melibatkan pemerintah sebagai pihak utama, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Perubahan ini kemudian memunculkan konsep *good governance*, yaitu tata kelola yang menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta keadilan. Menurut Wahyuni (2023), pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat lebih mampu menyeimbangkan kepentingan generasi kini dan mendatang, serta mengharmoniskan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan, sehingga menjadi dasar penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, semua negara dituntut untuk berubah dalam cara mengelola pemerintahan. Jika tidak bisa menyesuaikan diri, pemerintah berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mendorong reformasi birokrasi agar lebih terbuka, transparan, dan akuntabel (Noor et al., 2022 dan Wijaya dan Saleh, 2025). Penerapan *good governance* memiliki peran penting, sebab pemerintah dituntut memberi pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkualitas. Masalah sosial dan politik yang semakin rumit membuat pemerintah harus lebih transparan agar masyarakat tetap percaya. Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Jamal (2020) membuktikan bahwa *good governance* mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Tantangan utamanya adalah rendahnya kualitas pelayanan publik dan masih tingginya kasus korupsi. Data Ombudsman RI menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ada 10.158 laporan pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik, naik 48,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, instansi pemerintah daerah menjadi yang paling banyak diajukan dengan 4.117 laporan (Ombudsman RI dalam Novatiani et al., 2019). Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan masih jauh dari harapan masyarakat.

Pada kasus korupsi, Transparency International (2024) mencatat bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia naik menjadi 37 dari 100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara dibandingkan tahun sebelumnya. CPI merupakan peringkat yang sering dipakai untuk melihat kondisi korupsi di sektor publik suatu negara, berdasarkan penilaian para ahli

dan pelaku bisnis, sehingga hasilnya bisa memberi gambaran umum dan dibandingkan dengan negara lain. Kasus-kasus besar, seperti korupsi bantuan sosial COVID-19 pada 2020 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di Indonesia. Meski begitu, ada juga upaya perbaikan. Pemerintah mulai menerapkan digitalisasi layanan publik, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi, dan membangun pemerintahan yang lebih transparan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat (PANRB, 2022). Dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintahan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Walaupun konsep good governance telah lama menjadi prinsip utama pembangunan berkelanjutan dan terus ditegaskan dalam penelitian Wahyuni (2023), penelitian Novatiani dkk. (2019) juga mencatat tingginya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di pemerintah daerah, yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan *good governance*. Dan melihat dari fakta empiris mengenai skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang naik 3 peringkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 (Transparency International, 2023) serta kasus korupsi bansos COVID-19 yang dapat menegaskan lemahnya akuntabilitas. Hal ini menjadi alasan penting mengapa penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar *good governance* di Indonesia tetap relevan dan mendesak dilakukan. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah melihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai pilar utama *good governance*. Transparansi berarti keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan anggaran. Menurut Susanto (2019), kedua hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat efektivitas pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung *good governance*, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta melihat dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian terkait tata kelola pemerintahan, terutama dalam menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utamanya. Secara praktik, hasil penelitian ini bisa masukan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus meningkat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Good Governance merupakan konsep yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam manajemen pemerintahan. Menurut UNESCAP (2009), *Good Governance* mencakup proses yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Sumarto (2019) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah mekanisme dan praktik dalam pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur sumber daya dan menyelesaikan berbagai masalah. Tujuan utama *Good Governance* adalah menciptakan pemerintahan yang dapat menjamin pelayanan publik secara merata dengan melibatkan semua elemen atau pemangku kepentingan. *Governance* yang baik harus bersifat akuntabel, aktif, dan memiliki kesadaran kolektif, serta melibatkan pemerintah yang terbuka, responsif, dan mau mendengarkan. Untuk mencapai atau mewujudkan *Good Governance*, diperlukan perubahan yang memerlukan karakter kepemimpinan dari setiap pihak agar tercipta kemitraan antara pemangku kepentingan dalam komunitas lokal.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan serta keputusan yang dibuat. Menurut Bovens et

al. (2008), akuntabilitas mencakup dua elemen utama: akuntabilitas eksternal (kepada publik dan pemangku kepentingan) dan akuntabilitas internal (dalam organisasi pemerintah itu sendiri). Ini memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Widiyanti (2019), ia menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah tanggung jawab individu atau organisasi untuk melaporkan pengelolaan yang dilakukan dari awal hingga akhir guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tingkat akuntabilitas akan meningkat apabila didukung oleh sistem akuntansi yang mampu menyediakan informasi yang akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Lestari, 2014). Dalam sektor publik, akuntabilitas berarti kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dijalankan serta berkontribusi dalam membangun masyarakat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Transparansi

Transparansi dalam sektor publik merujuk pada keterbukaan informasi dan aksesibilitas data bagi masyarakat. Menurut Florini (2007), transparansi dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan transparansi, masyarakat memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah, sehingga mendorong pertanggungjawaban. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menekankan pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat secara tertulis melalui media yang mudah diakses. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus disusun tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam *Good Governance*, dan memiliki hubungan yang erat dengan transparansi serta akuntabilitas. Menurut Wijaya & Saleh, (2025) dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, publik dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Saat masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa lebih memiliki dan dapat memberikan kontribusi yang berarti, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, partisipasi publik tidak hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kinerjanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memahami peran transparansi dan akuntabilitas dalam *good governance* di sektor publik. SLR digunakan untuk meninjau berbagai penelitian melalui sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan platform daring seperti Google Scholar. Data yang dianalisis berasal dari kajian literatur yang membahas transparansi, akuntabilitas, dan penerapannya di sektor publik.

Proses Pencarian Data

Sumber data diperoleh melalui proses pencarian menggunakan Google Scholar dan Jurnal SINTA melalui browser Google Chrome dengan menggunakan kata kunci “Transparansi”, “Akuntabilitas”, dan “Good Governance”.

Kriteria Batasan

Data dapat dinilai layak atau tidak jika telah memenuhi kriteria berikut:

1. Data sesuai dengan topik yang diteliti
2. Data penelitian terdahulu yang diperoleh terdapat jurnal minimal terindeks SINTA
3. Data yang digunakan termasuk data penelitian yang diterbitkan atau terpublikasi tahun 2016–2024

Kualitas Penelitian

Tahapan pada kualitas penilaian akan dilakukan dengan menyeleksi artikel Berdasarkan pertanyaan yang memenuhi kriteria tertentu, seleksi dilakukan dengan mengevaluasi kualitas artikel menggunakan daftar *Quality Assessment (QA)*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pencarian data dalam penelitian ini diambil dari beberapa jurnal yang diterbitkan antara tahun 2016-2024 yang berkaitan dengan hubungan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Good Governance.

Tabel 1. Pengelompokan berdasarkan jenis jurnal

No	Penulis	Variabel	Nama Jurnal	Tahun
1.	Agustina, Nugroho dan Pramita (2023)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology</i>	2023
2.	Iswahyudi, Triyuwono dan Achsin (2016)	Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, <i>Value For Money, Good Governance</i>	Jurnal Ilmiah Akuntansi	2016
3.	Jayanti (2023)	Partisipasi Masyarakat dalam <i>Public Governance</i>	<i>Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)</i>	2023
4.	Resmadiktia, Utomo dan Aiman (2023)	Pertanggungjawaban Pemerintah, <i>Good Governance</i>	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan	2023
5.	Simanjuntak, et al. (2023)	Akuntabilitas, Kinerja Pemerintah	<i>Accounting Analysis Journal</i>	2023
6.	Sinta dan Risal (2023)	Implementasi <i>Good Governance</i> , Pengelolaan Keuangan Desa	Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)	2023
7.	Sumantri (2022)	Reformasi Birokrasi, <i>Good Governance</i>	Jurnal Papatung	2022
8.	Widanti (2022)	Konsep <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik	Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat	2022
9.	Yafizham dan Daulay (2024)	Akuntansi, <i>Good Governance</i>	GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi	2024
10.	Yulianto (2023)	<i>Good Corporate Governance</i> , Kinerja Maqashid Syariah	Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	2023

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Setelah melihat pengelompokan jurnal dalam tabel 1, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ada memiliki variasi yang luas terkait topik transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* dalam berbagai konteks. Beberapa artikel membahas penerapan prinsip-prinsip ini di sektor publik, seperti dalam pengelolaan keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Selain itu, beberapa jurnal juga memfokuskan pada aspek yang lebih spesifik, seperti akuntansi dalam mencapai *good governance* atau peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Hasil dari RQ-1: Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) di sektor publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) melalui beberapa faktor, seperti transparansi dalam laporan keuangan, akuntabilitas dalam kinerja pemerintah, partisipasi masyarakat, dan reformasi birokrasi. Temuan tersebut mendukung pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban untuk memperkuat kepercayaan publik dan membuat pemerintahan lebih efektif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Agustina, Nugroho, dan Pramita (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Sementara itu, pada penelitian Iswahyudi, Triyuwono, dan Achsin (2016) menegaskan bahwa akuntabilitas berperan penting dalam memastikan setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Penelitian Jayanti (2023) juga menemukan bahwa transparansi mendorong partisipasi masyarakat yang pada akhirnya memperkuat legitimasi keputusan publik.

Penelitian lain seperti Sumantri (2022) menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang didasari pada transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan konsep *Good Governance* menurut UNESCAP (2009), di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, efektif, dan bertujuan untuk kepentingan publik. Maka, dapat disimpulkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik tidak hanya memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Hasil dari RQ-2: Bagaimana dampak transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki dampak besar dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini didukung oleh keterbukaan informasi, tanggung jawab atas kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pelaporan kinerja yang jelas, semuanya berperan dalam menguatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian Agustina, Nugroho, dan Pramita (2023) menemukan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena masyarakat memiliki akses yang lebih jelas terhadap penggunaan anggaran negara. Temuan penelitian mereka sejalan dengan penelitian Iswahyudi, Triuwono, dan Achsin (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memperkuat kepercayaan publik dengan memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Selain itu, Jayanti (2023) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat yang muncul dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat memperkuat hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya. Penelitian Resmadiktia, Utomo, dan Aiman (2023) juga menunjukkan bahwa keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan publik meningkatkan legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Hasil dari beberapa penelitian tersebut mendukung pandangan *Social Trust Theory* (Florini, 2007) yang menjelaskan bahwa kepercayaan publik tumbuh ketika lembaga pemerintahan menjalankan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban secara konsisten. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi penting bagi terciptanya *good governance* yang berintegritas, dipercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil dari RQ-3: Apa hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good governance*?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai *good governance*. Transparansi mempermudah keterlibatan masyarakat, partisipasi memperkuat pengawasan publik, dan akuntabilitas menjamin tanggung jawab pemerintah, yang pada akhirnya menciptakan tata kelola yang efisien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian Agustina, Nugroho, dan Pramita (2023) menemukan bahwa transparansi mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Iswahyudi, Triuwono, dan Achsin (2016) juga menyatakan bahwa keterbukaan informasi memberi dasar bagi publik untuk ikut terlibat, sementara akuntabilitas memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan Jayanti (2023) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa ketika transparansi dan akuntabilitas berjalan baik, partisipasi publik meningkat karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian Resmadiktia, Utomo, dan Aiman (2023) serta Sumantri (2022) menemukan bahwa hubungan antara ketiga variabel tersebut menciptakan siklus pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. Transparansi membuka ruang dialog, partisipasi memperluas kontrol sosial, dan akuntabilitas menjamin hasilnya sesuai dengan kepentingan publik. Kombinasi ini membentuk siklus positif yang terus memperkuat kualitas *good governance*, baik di tingkat nasional maupun di Tingkat daerah. Hasil temuan tersebut sejalan dengan *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984), yang menekankan pentingnya keterlibatan semua

pemangku kepentingan dalam proses tata kelola organisasi atau pemerintahan. Hubungan sinergis antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan wujud nyata dari kolaborasi antarpihak untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berfokus pada pelayanan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *good governance* yang efektif tidak hanya bergantung pada keterbukaan dan pertanggungjawaban, tetapi juga pada seberapa besar masyarakat terlibat aktif dalam proses tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah mampu bertanggung jawab atas tindakan serta kebijakan yang dibuatnya. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung efektivitas pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat, yang dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas, berperan penting dalam mewujudkan tata kelola yang lebih inklusif dan responsif. Ketiga elemen ini saling mendukung untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan pembuat kebijakan dengan langkah-langkah nyata untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. Y., Nugroho, W. S., & Pramita, Y. D. (2023). Bukti Empiris Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Eks. Karisidenan Kedu Berdasarkan pada Teori Agency. *The 6th FEB ENEFECIUM: Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology* (pp. 578-593). Magelang: Journal Unimma: Universitas Muhammadiyah Magelang, <https://lateng.bpk.go.id>.
- Iswahyudi, A., Triuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, 151-166.
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Volume 8 No. 3*, 207-212.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 21 No. 2 , 1-7, <http://jurnaldialektika.com/>.
- Muhammad Yafizham, & Aqwa Naser Daulay. (2023). Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 01–15. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i1.986>
- Ni Wayan Desi Budha Jayanti. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 51–58. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58>
- Novatiani, A., Wedi, R., Kusumah, R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. In *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* (Vol. 10). www.eporja.bandungbaratkab.go.id
- Putri, B. I., Astuti, A., & Afianta, A. Y. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol. 5 No. 2, (pp. 106-115).

- Putu, N., & Widanti, T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1).
- Resmadiktia, N. M., Dwi Utomo, Y., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Simanjuntak, A., Siahaan, S. B., Situmorang, D. R., & Elisabeth, D. M. (2023). Factors Affecting Accountability Government Institution Performance. *Accounting Analysis Journal*, 12(2), 112–122. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v12i2.61983>
- Sinta, F. D., & Risal. (2023). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa Sepangah Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)*, Vol. 3 No. 1, 24-30, www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id.
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi Reformasi Birokrasi dan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Sektor Publik di Indonesia. *JURNAL PAPATUNG*, Vol. 5 No. 2, 63-72.
- Wahyuni, S. (2023). The Process of Reforming of Environmental Aspect With The Sustainable Management for Indonesia's Environmental Law. *Eduvest – Journal of Universal Studies, Volume 3 No. 3*, 655-666.
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 3, 2154-2164, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>.
- Yulianto, M. D., & Darwanto, D. (2023). Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah Asia Tenggara. *Al-Tijary*, 9(1), 35–51. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.5981>